

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecenderungan kecurangan akuntansi telah menarik banyak perhatian media dan menjadi isu yang menonjol serta penting di mata pemain bisnis dunia. Kecurangan merupakan bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan (Alison, 2006 dalam Rahmawati, 2012).

Ikatan Akuntansi Indonesia seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah satu atau menghilangkan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah satu yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecurangan akuntansi tidak dapat dihindarkan. Perusahaan akan menderita kerugian yang signifikan karena hal tersebut. Kecurangan akuntansi biasanya dipicu oleh perusahaan yang ingin agar laporan keuangannya terlihat baik. Selain itu, perusahaan juga ingin mengurangi persepsi di mata para calon investor bahwa perusahaannya beresiko. Saham perusahaan mungkin akan dinilai lebih tinggi jika investor menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat resiko yang rendah, karena mereka tidak akan khawatir perusahaan akan bangkrut.

Untuk menciptakan persepsi yang baik tersebut beberapa perusahaan menggunakan strategi yang licik dengan melakukan penipuan, seperti pada tahun 2016 yakni kasus beberapa BPR yang ada di Indonesia. Baru beberapa bulan berjalan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menutup empat BPR akibat gulung tikar. OJK tercatat telah melikuidasi BPR Dana Niaga Mandiri dari Makassar, Sulawesi Selatan, terhitung mulai 13 April 2016 dan BPR Syariah Al-Hidayah, Jawa Timur, terhitung mulai 25 April 2016. Sebelumnya, BPR Mitra Bunda Mandiri dari Sumatra Barat dan BPR Agra Arthaka Mulya dari Yogyakarta yang dilikuidasi OJK, tepatnya pada Januari 2016. (Infobanknews.com, 2017)

Menurut Fauzy (2017), ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kinerja keuangan sebuah BPR menjadi bermasalah hingga berujung pada pencabutan ijin usaha. Baik OJK

maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menyatakan bahwa kebanyakan BPR yang dicabut ijin usahanya bukan karena kalah dalam persaingan, melainkan lebih disebabkan *fraud* yang dilakukan pengurus BPR. Salah satunya, karena BPR tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG).

Bukti lain, kasus BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2011 yaitu pencairan deposito Rp 6.000.000.000,00 milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.

Menurut Arifiyani (2012) tindakan kecurangan dapat dipengaruhi oleh adanya sistem pengendalian internal dan monitoring oleh atasan. Abbot et al dalam Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika sistem pengendalian internal lemah maka akan menyebabkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi yang tidak teliti dan tidak dapat di percaya, tidak efektif dan efisiennya kegiatan-kegiatan operasional perusahaan serta tidak dapat di patuhinya kegiatan manajemen yang di tetapkan.

Apabila pengendalian intern dalam suatu perusahaan telah efektif, maka dapat memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Wilopo, 2006).

Selain pengendalian intern faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah asimetri informasi. Nicholson (1997: 487- 489) dalam Wilopo (2006) mencatat bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen dipengaruhi oleh situasi asimetri informasi. Asimetri informasi adalah situasi ketika terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi disebabkan oleh permasalahan keagenan yang terjadi bila prinsipal merasa kesulitan untuk menelusuri apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen.

Menurut Rahmawati (2006), adanya asimetri informasi antara manajer sebagai (*agent*) dan pemilik (*principal*) menyebabkan kesenjangan pengetahuan keuangan internal perusahaan sehingga pihak manajer bisa melakukan rekayasa demi meningkatkan laba untuk mendapat kompensasi atau imbalan dari pemilik. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Pemilik menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki. Sedangkan

manajer menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi atau bonus yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya.

Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar dan manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat bagi mereka, demi motivasi untuk memperoleh kompensasi bonus yang tinggi, mempertahankan jabatan dan lainnya.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, kesesuaian kompensasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan akuntansi. Kompensasi acap kali disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi (Panggabean, 2002 dalam Friskila, 2010). Dengan kompensasi yang sesuai, kecurangan akuntansi dapat berkurang. Individu diharapkan telah mendapatkan kepuasan dari kompensasi tersebut dan tidak melakukan perilaku curang dalam akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Kompensasi menurut Hasibuan (2003:118) adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang di berikan ke perusahaan. jika di kelola dengan baik, kompensasi akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan dan memperoleh, memelihara, serta menjaga karyawan dengan baik, sebaliknya tanpa kompensasi yang cukup (sesuai dan adil) karyawan yang ada akan sangat mungkin untuk meninggalkan perusahaan. Akibat dari ketidakpuasan pembayaran yang di rasa kurang dan tidak adil akan mengurangi kinerja, meningkatkan keluhan-keluhan, mogok kerja dan mengarah kepada tindakan-tindakan fisik dan psikologis seperti meningkatkan derajat ketidakhadiran dan kecurangan (Rivai, 2004:358).

Jansen and Meckling (1976) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pemberian kompensasi yang memadai membuat manajemen bertindak sesuai keinginan pemegang saham, yaitu memberikan informasi sebenarnya tentang keadaan perusahaan. Pemberian kompensasi ini di harapkan mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian ini menggunakan bank sebagai objek penelitian, walaupun bank identik dengan kompensasi yang cukup besar dan sistem pengendalian intern yang cukup ketat, namun pada faktanya masih ada beberapa yang dilikuidasi akibat terjadinya kecurangan akuntansi dalam perusahaan tersebut.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Wilopo pada tahun 2006 dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Terbuka dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia”, faktor-faktor

yang diteliti dalam penelitian Wilopo adalah variabel bebas keefektifan pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, ketaatan pada aturan akuntansi, asimetris informasi, moralitas manajemen, serta variabel terikat perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Dimana pada penelitian Wilopo yang dijadikan sampel adalah Perusahaan terbuka dan BUMN diseluruh Indonesia dengan metode pengambilan sampel adalah *Stratified Random Sampling*, yaitu mengelompokan perusahaan berdasarkan sembilan sektor usaha. Sehingga peneliti melihat adanya kelemahan yaitu ada kemungkinan tidak terambilnya sampel secara merata yang mewakili setiap daerah di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah efektifitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
2. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh efektifitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Menguji pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perkembangan teori dalam bidang Akuntansi Keuangan khususnya mengenai pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

2. Manfaat Kebijakan

a. Bagi BPR di Kota dan Kabupaten Malang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk mendorong karyawan dalam meningkatkan pengendalian internal dalam perusahaan, asimetri informasi dan kesuaian kompensasi pada karyawan dalam rangka meminimalisasikan tindakan kecurangan yang terjadi pada instansi.

b. Bagi Mahasiswa lain

Penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai kasus Kecurangan Akuntansi yang marak terjadi. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mereka akan lebih memahami mengenai Kecurangan Akuntansi yang terjadi sehingga pada kemudian hari ketika mereka terjun ke dalam profesi akuntan dapat terhindar dari sifat krisis etis profesional.